

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Elemen penting dalam tata pemerintahan yang baik adalah adanya akuntabilitas publik, transparansi, tegaknya hukum, dan peraturan. Karenaitu, pengawasan yang merupakan unsur penting dalam proses manajemen pemerintahan, memiliki peran yang sangat strategis untuk terwujudnya akuntabilitas publik dalam pemerintahan dan pembangunan. Melalui suatu kebijakan pengawasan yang komprehensif dan membina, maka diharapkan kemampuan administrasi publik yang saat ini dianggap lemah, terutama di bidang kontrol pengawasan, dapat ditingkatkan kapasitasnya dalam rangka membangun infrastruktur birokrasi yang lebih kompetitif. (PERMENPAN NO. PER/03/M.PAN/02/2006)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah membawa implikasi perlunya sistem pengelolaan keuangan negara yang lebih akuntabel dan transparan. Semuanya dapat dicapai jika seluruh penyelenggara Negara dari tingkat pimpinan sampai tingkat pelaksana mampu melaksanakannya mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, sampai dengan pertanggungjawaban, dilaksanakan secara tertib, terkendali, efisien dan efektif.

Pasal 58 ayat (1) dan ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, memerintahkan pengaturan lebih lanjut ketentuan mengenai sistem pengendalian intern pemerintah secara menyeluruh dengan Peraturan Pemerintah, yakni “Presidensi selaku Kepala Pemerintahan mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan secara menyeluruh”.

Sistem Pengendalian

Internal dalam Peraturan Pemerintah ini didasarkan pada pemikiran bahwa Sistem Pengendalian Intern melekat sepanjang kegiatan, dipengaruhi oleh sumber daya manusia, serta hanya memberikan keyakinan yang memadai, bukan keyakinan mutlak.

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Untuk itu dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan keyakinan memadai bahwa penyelenggaraan kegiatan pada suatu instansi Pemerintah dapat mencapai tujuannya secara efisien dan efektif, melaporkan pengelolaan keuangan negara secara andal, mengamankan aset negara, dan mendorong ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

Menurut hasil evaluasi yang dilakukan oleh BPK atas sistem akuntansi dan prosedur pengamanan kekayaan/keuangan pemerintah daerah, atau biasa disebut sistem pengendalian internal (SPI), laporan keuangan pemerintah daerah yang memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dan wajar dengan pengecualian (WDP) pada umumnya memiliki sistem pengendalian internal yang lebih baik dibandingkan dengan pemerintah daerah yang memperoleh opini tidak wajar (TW) dan tidak memberikan pendapat (TMP).

Atas berbagai kelemahan tersebut, maka untuk mencapai pengelolaan keuangan negara/daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel, kepala daerah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintah. Pengendalian internal pemerintah berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP). Sistem pengendalian internal pemerintah memiliki fungsi untuk memberikan keyakinan yang memadai bagi tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, keandalan laporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap undang-undang. Dengan penerapan sistem pengendalian internal pada masing-masing organisasi pemerintah, diharapkan adanya perbaikan kualitas penyusunan laporan keuangan yang tergambar dalam opini audit yang dilaksanakan oleh BPK.

Penelitian sebelumnya dilakukan oleh Almada Primadona (2012) tentang Pengaruh Pengawasan Internal dan Pengelolaan Keuangan Daerah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah (Penelitian Pada Pemerintah Kota Bandung). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah secara bersama-sama mempunyai korelasi yang cukup dan memberikan kontribusi atau pengaruh sebesar 37,9%

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

terhadap kinerja pemerintah daerah dimana semakin baik pengawasan internal dan pengelolaan keuangan daerah maka akan semakin baik pula kinerja pemerintah daerah pada dinas di Kota Bandung.

Siti Nurjanah Saleba (2014), tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP)

berpengaruh positif terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah. Semakin baik sistem pengendalian intern pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin baik sebaliknya semakin buruk sistem pengendalian internal pemerintah yang diterapkan maka efektivitas pengelolaan keuangan daerah juga akan semakin buruk.

Hal ini didukung oleh unsur-unsur sistem pengendalian internal pemerintah yang digunakan dalam pencapaian tujuannya yaitu lingkup pengendalian, penilaian risiko, kegiatan pengendalian, informasi dan komunikasi, serta pemantauan. Adapun Penelitian dari Lopita Turwidani (2015) tentang Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Dan Pengawasan Fungsional Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah (Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Pariaman).

Hasil penelitian menunjukkan bahwa 76,8% efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada kota Pariaman dipengaruhi oleh faktor sistem pengendalian Intern Pemerintah

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi menyatakan adapeningkatan pada nilai kinerja akuntabilitas baik di tingkat kabupaten/kota maupun tingkat provinsi di Indonesia. Meskipun begitu,

saat ini kualitas aparatur masih harus sebatas prosedur dan belum sampai pada dampak

yang terasa di masyarakat, karena masih ada indikator lainnya yang

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

harus dipenuhi yaitu pemerataan dan pelayanan yang lebih baik (<http://news.detik.com/berita/3140608/menteri-yuddy-kinerja-pemerintah-daerah-meningkat-tapi-sebatas-prosedur>). Penilaian akuntabilitas kinerja pemerintah dari 34 provinsi, diperoleh hasil bahwa 17 provinsi mendapat penilaian baik dan sisanya 17 provinsi mendapat penilaian kurang baik (www.menpan.go.id).

Hasil evaluasi kinerja pemerintah provinsi pada tahun ini akan mempengaruhi Dana Alokasi Khusus (DAK) yang akan dikurkano oleh pemerintah pusat. Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi (Menpan-RB) mengatakan bahwa pemerintah pusat akan memberikan dukungannya bagi pemerintah provinsi yang memiliki akuntabilitas kinerja yang baik (<http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/12/15/nzepic354-kinerja-pemprov-buruk-pemerintah-tahan-dana-alokasi-khusus>)

Mengacu pada fenomena yang terjadi di Kabupaten Bandung Barat (KBB) dimana Pemerintah Kabupaten Bandung Barat ditekankan untuk lebih memperhatikan kualitas laporan keuangan meliputi tata kelola laporan keuangan yang baik, transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan khususnya mengenai penggunaan APBD. Hal itu terkait belum adanya penyelesaian kasus pengelolaan keuangan dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) yang terjadi setiap tahun di Pemerintah Kabupaten Bandung Barat. BPK RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Bandung Barat tahun anggaran 2015.

Menurut, Kepala BPK RI Perwakilan Jabar, Arman Syifa, salah satu hal yang menjadi permasalahan adalah pemeriksaan terhadap Laporan Pengelolaan Keuangan seluruh Kab/ Kota masih berkutat pada permasalahan aset. Bahkan 77,4 persen aset yang dimiliki Kab/Kota di Jabar masih belum tersertifikasi (<http://www.bandungbaratkab.go.id>, 7 Juni 2016). Data penilaian pertama kali yang diterima oleh KBB menunjukkan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini terhadap Kabupaten Bandung Barat tahun 2009

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

dengan opini Tidak Memberikan Pendapat (*Disclaimer*), dan pada tahun 2010-2015 mengalami perbaikan yang cukup baik dengan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP).

Secara umum dari hasil pemeriksaan 6 tahun terakhir, untuk Kabupaten/Kota di wilayah Jawa Barat khususnya di Kabupaten Bandung Barat BPK masih menemukan temuan yang berulang, yang menjadi pengecualian dalam pemberian opini, yaitu temuan mengenai penyajian aset tetap, penyajian persediaan yang tidak memadai, dan penyajian penyertaan modal pemerintah yang tidak sesuai dengan SAP. Hal tersebut mendorong Pemerintah Kabupaten Bandung Barat untuk merubah penilaian itu menjadi Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang dipaparkan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dan dituangkan dalam skripsi dengan judul **“Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Efektivitas Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Barat”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang, masalah dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan sistem pengendalian internal pemerintah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat?
2. Bagaimana efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
3. Bagaimana pengaruh penerapan sistem pengendalian internal pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

Maksud dari penelitian ini yaitu untuk mengkaji dan mendapat gambaran mengenai pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka dapat disimpulkan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui:

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
- 2) Efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat
- 3) Pengaruh Penerapan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah pada pemerintah daerah Kabupaten Bandung Barat

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penulis sangat berharap hasil dari penelitian yang dilakukan dapat berguna bagi pengembangan ilmu akuntansi sektor publik dan pengembangan pada ilmu lain pada umumnya.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Bagi Penulis
 - a. Sebagai suatu pengalaman yang berharga karena penulis dapat memperoleh gambaran secara langsung mengenai pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah terhadap efektivitas pengelolaan keuangan daerah
 - b. Sebagai sarana untuk menambah khasanah keilmuan, khususnya dalam menambah wawasan untuk menyikapi isu-

Katasya Dhea Rusmifa, 2017

PENGARUH PENERAPAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

(Studi Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung Barat)

Universitas Pendidikan Indonesia | repository.upi.edu | perpustakaan.upi.edu

isukekiniandalammengembangkanakuntansikhususnyaakuntansisektor publikitusendiri, dan membandingkan dengan teori.

2. Bagi Instansi Pemerintah Daerah

Bagi instansi pemerintah daerah dapat memberikan sumbang saran khususnya dalam hal Sistem Pengendalian Internal Pemerintah dalam hubungannya dengan efektivitas pengelolaan keuangan daerah.

3. Bagi Peneliti

Bagi pada umumnya diharapkan dapat dijadikan bahan masukan, bisa dijadikan literatur bagi yang memerlukan.